BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam arah kebijakan dan praktik bisnis global. Sejak disahkannya *Sustainable Development Goals (SDGs)* oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) pada tahun 2015 perusahaan dituntut tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada kontribusinya terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip tersebut menekankan bahwa perusahaan dapat menjalankan aktivitas ekonomi untuk memperoleh laba, sepanjang operasinya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan ataupun mengganggu keseimbangan sosial masyarakat (Irawan, 2024). Hubungan perusahaan dengan lingkungan internal maupun eksternal berperan penting dalam menentukan keberhasilan dan pencapaian tujuan organisasi di era bisnis modern. Perusahaan harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kebutuhan para *stakeholder*, baik di dalam maupun di luar organisasi ((Khaeruman) & (Tabroni, 2024)). Keberlangsungan suatu entitas ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam menciptakan hubungan yang harmonis dengan para *stakeholder*, karena hal tersebut menjadi dasar untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan jangka panjang (Mayangsari, 2025).

Salah satu wujud tanggung jawab perusahaan terhadap para *stakeholder* diantaranya tercermin melalui penerapan akuntansi lingkungan sebagai bagian dari sistem akuntansi yang berfungsi mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkapkan informasi mengenai dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan (Sabrang, 2024). Dalam perspektif akuntansi, informasi lingkungan menjadi bagian penting dalam penyajian laporan keuangan karena mencerminkan penggunaan sumber daya dan konsekuensi sosial ekologis dari aktivitas operasional (Hasibuan, 2024). Oleh karena itu, perusahaan dapat secara sukarela mengungkapkan informasi terkait biaya dan aktivitas lingkungan seperti biaya pengelolaan limbah, emisi karbon, atau

investasi pada efisiensi energi sebagai bentuk akuntabilitas terhadap publik ((Fahira) & (Yuliandhari, 2025)).

Pada konteks ini, SEOJK No.16 tahun 2021 menjelaskan bahwa *Sustainability Report* (Laporan Keberlanjutan) merupakan laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan sesuai dengan prinsip *Triple Bottom Line* yang diperkenalkan oleh Elkington pada tahun 1998. Konsep ini menekankan bahwa keberlanjutan perusahaan tidak hanya diukur dari laba (*profit*), tetapi juga dari kontribusi terhadap manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) (Roni et al., 2026). Seiring dengan perkembangan paradigma keberlanjutan global, konsep ini mengalami perluasan menjadi *Quadruple Bottom Line*, yang menambahkan dimensi keempat berupa *purpose* yang menjadi dasar bagi aktivitas bisnis berkelanjutan (Tiller et al., 2022). Dimensi ini menekankan bahwa keberlanjutan tidak hanya menuntut keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, tetapi juga memerlukan tujuan etis yang berakar pada integritas, tata kelola yang baik, dan kesadaran spiritual dalam setiap proses bisnis. Pada satu dekade terakhir, terutama di Indonesia, *sustainability reporting* semakin mendapat perhatian dari investor yang kini menilai perusahaan secara lebih komprehensif. Mereka tidak hanya berfokus pada laporan keuangan konvensional, tetapi juga mempertimbangkan informasi non-keuangan yang mencerminkan tanggung jawab sosial dan komitmen lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Quadruple Bottom Line* diterapkan melalui penyusunan *Sustainability Reporting* sebagai wujud nyata komitmen terhadap keberlanjutan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ((Kusuma Dewi) & (Fitriani, 2024)).

Sustainability report memiliki peran penting bagi perusahaan karena memberikan gambaran transparansi mengenai aktivitas dan dampak keberlanjutan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan (Maulida & Dwi, 2026). Sebelum diterbitkannya Peraturan

tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, penerbitan *sustainability report* di Indonesia masih bersifat sukarela *(voluntary disclosure*)**.** Artinya, perusahaan belum memiliki kewajiban hukum untuk menyusun dan memublikasikan *sustainability report*, sehingga pelaksanaannya lebih didorong oleh kesadaran etis dan tekanan *stakeholder*, bukan oleh regulasi formal ((Martusa & Meythi, 2025)). Meskipun bersifat sukarela, *sustainability report* memiliki nilai strategis dalam membangun citra positif, reputasi, dan daya saing perusahaan di mata investor dan masyarakat. Pengungkapan sukarela ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmennya terhadap prinsip keberlanjutan, sekaligus memperkuat hubungan dengan para *stakeholder* melalui penyampaian informasi non-keuangan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, meskipun belum diwajibkan secara hukum sebelum diberlakukannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan, *sustainability report* telah menjadi bagian penting dari strategi tata kelola perusahaan yang etis dan berorientasi pada keberlanjutan.

Pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mewajibkan perusahaan sektor jasa keuangan untuk menyusun *sustainability report* secara berkala. Selain itu, pemerintah juga menegaskan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(*TPB/SDGs*)*, yang mendorong sektor swasta berperan aktif dalam mendukung aspek sosial dan lingkungan. Pada tahun 2019, Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan kerja sama kembali dengan *Global Reporting Initiative* (GRI) dengan mengadakan seminar yang merupakan bentuk *capacity building* dan pembinaan kepada perusahaan tercatat untuk mendukung dalam persiapan penyusunan *Sustainability Reporting*. Lebih lanjut, regulasi tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi

sustainability report bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Aturan ini memberikan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai struktur, indikator, dan tata cara penyusunan *sustainability reporting***,** termasuk integrasi dengan standar *Global Reporting Initiative* (GRI). Melalui kebijakan ini, OJK menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pelaporan perusahaan publik di Indonesia. Dengan demikian, SEOJK No.16/2021 menjadi landasan normatif yang memperkuat implementasi *sustainability reporting*, tidak lagi sekadar bersifat sukarela, tetapi menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Perkembangan *Sustainability Reporting* pada tingkat global semakin pesat sejak dibentuknya *International Sustainability Standards Board (*ISSB*)* pada tahun 2021. Lembaga ini bertugas mengembangkan standar *sustainability reporting* yang selaras secara global dan bertujuan untuk memastikan konsistensi, transparansi, dan keterbandingan laporan keuangan lintas negara yang dikenal dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi keberlanjutan, ISSB kemudian menerbitkan dua standar utama, yaitu *IFRS Sustainability Disclosure Standard* 1 (IFRS S1) dan *IFRS Sustainability Disclosure Standard* 2(IFRS S2). IFRS S1 berfokus pada prinsip umum penyajian informasi keberlanjutan, yang mencakup pengungkapan faktor-faktor material lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dapat memengaruhi nilai dan kinerja jangka panjang perusahaan. Sedangkan IFRS S2 secara khusus mengatur pengungkapan risiko dan peluang yang terkait dengan perubahan iklim, termasuk strategi mitigasi, adaptasi, serta dampaknya terhadap posisi keuangan dan prospek bisnis perusahaan.

Sesuai dengan pedoman GRI, bahwa untuk menentukan perusahaan sudah melakukan pengungkapan *Sustainability Report,* dapat dilihat dari item yang diungkapkan oleh perusahaan. Pada standar terbaru yaitu GRI *Standars* 2021, jumlah item pengungkapan yang diguanakan yaitu 117 item. GRI Standards 2021 struktur pengungkapan terdiri atas standar universal yang mencakup GRI 1 (*Foundation* 2021), GRI 2 (*General Disclosures* 2021), dan

GRI 3 (*Material Topics* 2021), serta dilengkapi dengan *topic standards* yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta *sector standards* yang disesuaikan dengan karakteristik industri perusahaan. Apabila perusahaan mengungkapkan item yang terdapat di GRI Standars maka diberi nilai 1 dan apabila tidak mengungkapkan maka diberi nilai 0 (Gunawan et al., 2023).

Penelitian Christensen & Hail, (2021) menjelaskan bahwa, meskipun *sustainability reporting* telah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transparansi serta akuntabilitas sosial dan lingkungan perusahaan, implementasinya di Indonesia masih belum merata. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021, penyusunan *sustainability reporting* telah bersifat wajib (*mandatory*) bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Namun, dalam praktiknya, belum seluruh perusahaan memenuhi kewajiban tersebut secara konsisten dan komprehensif . Menurut data OJK (2023), dari seluruh emiten di Bursa Efek Indonesia, masih terdapat sebagian yang belum menyerahkan *sustainability report* tepat waktu atau belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan format dan indikator yang diatur dalam SEOJK No.16/2021. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun regulasi sudah bersifat mandatori, tingkat kesadaran dan kualitas pengungkapan keberlanjutan masih perlu diperkuat, khususnya pada sektor dengan potensi risiko lingkungan tinggi seperti manufaktur.

Sektor manufaktur memiliki peranan penting dalam dinamika pembangunan ekonomi sekaligus menjadi bagian dari aktivitas industri yang berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan (Prabowo et al., 2025). Aktivitas produksinya yang melibatkan pemanfaatan sumber daya alam, proses pengolahan bahan baku, serta pembuangan limbah menjadikan sektor ini rentan terhadap isu keberlanjutan apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab. Meskipun industri manufaktur memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sektor ini juga berpotensi menjadi sumber emisi karbon dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu,

pengungkapan *sustainability reporting* dalam sektor manufaktur menjadi aspek yang penting untuk memastikan keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan. Diantara berbagai subsektor manufaktur, industri makanan dan minuman memiliki peran yang cukup strategis dalam aktivitas ekonomi dan keberlanjutan lingkungan**.** Tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk makanan dan minuman menyebabkan perputaran persediaan (*inventory turnover*) yang cepat serta aktivitas produksi yang berlangsung hampir tanpa henti. Kondisi tersebut meningkatkan potensi timbulnya limbah padat, limbah cair, dan emisi dari proses pengolahan bahan baku maupun distribusi produk (Yulyan et al., 2024). Oleh karena itu, perusahaan dalam sub sektor makanan dan minuman dituntut memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap tanggung jawab lingkungan, yang seharusnya tercermin melalui *sustainability reporting* secara transparan dan konsisten (Maulida & Dwi, 2026).

Pada beberapa tahun terakhir, pelaksanaan dan pengungkapan *sustainability reporting* di sektor manufaktur, khususnya industri makanan dan minuman, menunjukkan adanya perkembangan yang beragam dalam penerapan prinsip keberlanjutan (OJK 2023). Meskipun kesadaran terhadap pentingnya tanggung jawab lingkungan dan sosial semakin meningkat, sejumlah perusahaan masih menghadapi tantangan dalam memenuhi standar pelaporan yang ditetapkan oleh regulator. Beberapa perusahaan dalam sub sektor makanan dan minuman merupakan entitas besar dengan reputasi yang telah dikenal luas, sehingga secara ideal diharapkan mampu menunjukan komitmen yang lebih kuat dan konsisten terhadap prinsip keberlanjutan dibandingkan dengan perusahaan berskala lebih kecil. Kendala utama pengungkapan *sustainability reporting* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga kesiapan sistem pengukuran, pemantauan, dan dokumentasi di tingkat operasional yang masih memerlukan penguatan lebih lanjut (OJK, 2024). Kepatuhan atau ketidakpatuhan dalam pengungkapan *sustainability reporting* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman memiliki

dampak yang lebih signifikan, baik terhadap persepsi publik maupun terhadap dorongan praktik keberlanjutan di tingkat industri secara keseluruhan.

Salah satu perusahaan yang mendapat perhatian publik yaitu PT Mayora Indah Tbk pada 7 Oktober 2021 dimana, warga yang bermukim di sekitar sungai atau kali kunir, Balaraja, Tangerang, Banten, melaporkan adanya pembuangan limbah industri dari fasilitas produksi Mayora Group yang menyebabkan air sungai berwarna hitam pekat, berbau menyengat, dan menimbulkan gangguan lingkungan di wilayah sekitar. Dampak pencemaran ini dirasakan langsung oleh sekitar 215 kepala keluarga di RT 01, RW 02, Desa Gembong, yang mengeluhkan air sumur mereka turut tercemar sehingga tidak layak untuk kebutuhan konsumsi harian. Kondisi serupa juga dialami oleh warga di Desa Sumur Bandung, yang tinggal di sepanjang aliran sungai tersebut. Menurut kesaksian warga, aktivitas pembuangan limbah dilakukan pada waktu-waktu tertentu, terutama pada malam hari setelah waktu magrib, ketika perubahan warna dan bau air sungai menjadi sangat kentara. Hingga saat itu, belum terdapat tindakan pertanggungjawaban atau klarifikasi resmi dari pihak PT Mayora Indah Tbk terkait insiden pencemaran tersebut (Monitortanggerang.com)

Sementara itu, PT Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO) produsen air minum dalam kemasan merek Alto, menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat rendah dalam pelaksanaan *sustainability reporting*. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga awal tahun 2026, tingkat pengungkapan *Sustainability Report* perusahaan ini tercatat masih sangat minim, yaitu rata-rata di bawah 25% dari total indikator yang disyaratkan dalam POJK No. 51 Tahun 2017 serta pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI). Rendahnya tingkat pengungkapan tersebut tidak terlepas dari permasalahan administratif yang berulang, khususnya keterlambatan dan ketidaklengkapan penyampaian *annual report*. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya informasi penting terkait aktivitas dan dampak lingkungan perusahaan yang seharusnya dapat diakses oleh publik dan investor, sehingga pada januari 2026 PT Tri Banyan

Tirta tbk terkena Peringatan Tertulis III oleh OJK dan Denda sebesar Rp150 juta karena terlambat menyampaikan Laporan Tahunan termasuk *sustainability report*. Pada aspek lingkungan, tingkat pengungkapan ALTO hanya berada pada angka 15% hingga 22%. Skor ini terutama dipengaruhi oleh rendahnya keterbukaan data pada aspek pengelolaan limbah plastik, efisiensi energi, serta dampak sosial dari rantai pasoknya**,** sebagaimana juga dikritisi oleh lembaga independen seperti WWF Indonesia dan IISD (*International Institute for Sustainable Development*). Tekanan tersebut juga menunjukkan bahwa keberlanjutan kini bukan sekadar isu kepatuhan, tetapi telah menjadi faktor penting dalam menilai reputasi dan daya saing perusahaan di pasar modal (Katadata, 2023).

Institute for Essential Services Reform (IESR) sebuah lembaga di Indonesia yang berfokus pada energi dan lingkungan, menyoroti bahwa sistem *sustainability reporting* di subsektor makanan dan minuman masih menghadapi tantangan dalam hal verifikasi independen, pengumpulan data berbasis indikator ESG, serta integrasi teknologi digital dalam pemantauan kinerja keberlanjutan. Banyak perusahaan yang masih memandang *sustainability report* sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kepercayaan investor dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas internal dan komitmen terhadap transparansi menjadi langkah penting agar *sustainability reporting* benar-benar mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat secara berkelanjutan (IESR, 2023; ESG Watch, 2024).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, terlihat bahwa banyak perusahaan di Indonesia yang belum patuh untuk melaporkan *Sustainability Reporting*, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Hutapea (2023) yang mempengaruhi pengungkapkan *sustainability report* yaitu *corporate social performance, Environmental Performance, Return on asset,* dan *manufacturing company*. Sedangkan, menurut Krisyadi (2024) faktor yang mempengaruhi *sustainability report* yaitu Risiko Lingkungan, *Environmental Cost*, *Carbon Emission Dsiclosure,* dan *Firm Value.* Adapun

faktor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Corporate Social Performance*, Risiko Lingkungan, *Environmental Cost*, dan *Environmental Performance*.

Faktor pertama yang diindikasikan dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability reporting* yaitu *Corporate Social Performance* (CSP). *Corporate Social Performance* (CSP) dipahami sebagai hasil nyata dari aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terintegrasi dalam operasional bisnis sehinggan menciptakan nilai bagi perusahaan dan masyarakat (Carroll, 2025). CSP berbeda dari konsep CSR tradisional karena menekankan pada pengukuran hasil dan dampak nyata dari aktivitas sosial perusahaan, bukan hanya proses. Secara teoritis, CSP berkaitan erat dengan *sustainability reporting* karena kinerja sosial yang terukur dan terintegrasi menyediakan bahan factual untuk diungkapkan dalam laporan keberlanjutan: program pemberdayaan komunitas, inovasi produk ramah lingkungan, atau investasi pada rantai pasok berkelanjutan merupakan bukti nyata yang dapat dilaporkan untuk memperkuat legitimasi perusahaan dan sinyal pasar (Fosu et al., 2024). Dengan demikian, perusahaan yang mencapai CSP secara substansial seharusnya lebih mampu dan termotivasi untuk menyusun sustainability report yang komprehensif.

Pengaruh *Corporate Social Performance* (CSP) terhadap *Sustainability Reporting* telah ditelaah pada beberapa penelitian terdahulu, akan tetapi menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian Bancu (2024) dan Susanto & Mardiana (2025) menunjukkan bahwa CSP berpengaruh positif terhadap *Sustainability Reporting*, dimana kinerja sosial perusahaan yang dikelola secara strategis, terintegrasi, dan berlandaskan prinsip etika mampu memperkuat reputasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan *stakeholder*, serta mendorong transparansi dan keberlanjutan jangka panjang. Sedangkan penelitian Prihandini (2025) dan Mitzy, S. E. M., & Wijaya (2025) menunjukan bahwa CSP berpengaruh negatif terhadap *sustainability reporting*, Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya kinerja sosial

perusahaan tidak selalu diikuti dengan tingkat pengungkapan yang lebih luas. Perusahaan dengan kinerja sosial yang baik cenderung membatasi pengungkapan karena telah memperoleh legitimasi, atau dipengaruhi oleh tekanan pasar dan persepsi investor terhadap efektivitas kinerja sosialnya..

Faktor selanjutnya yaitu Risiko Lingkungan. Risiko lingkungan merupakan potensi ancaman terhadap ekosistem yang timbul akibat aktivitas operasional perusahaan, baik dalam bentuk pencemaran udara, air, maupun tanah (Singh & Bernstein, 2022). Dalam konteks industri manufaktur, terutama subsektor makanan dan minuman, risiko ini menjadi perhatian penting karena proses produksinya sangat bergantung pada penggunaan air, bahan baku organik, serta menghasilkan limbah yang dapat berdampak langsung terhadap keseimbangan ekosistem (Lazuardy et al., 2024). Semakin tinggi tingkat risiko lingkungan yang dihadapi perusahaan, semakin besar pula tuntutan bagi manajemen untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengungkapan keberlanjutan (Yudiansyah & Burhany, 2025). Secara konseptual, perusahaan yang memiliki paparan risiko lingkungan tinggi cenderung terdorong untuk mengungkapkan *sustainability report* sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan (I. P. Dewi et al., 2025). *Sustainability report* tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi dengan para pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi sarana mitigasi reputasi dan bukti komitmen terhadap prinsip keberlanjutan (Maulida & Dwi, 2026).

Pengaruh Risiko Lingkungan terhadap *Sustainability Reporting* telah diteliti pada beberapa penelitian terdahulu, namun menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian Zhao et al., (2022) serta Rasyid & Setiawan (2023) menunjukkan bahwa Risiko Lingkungan berpengaruh positif terhadap *Sustainability Reporting*, pengungkapan *sustainability reporting* yang transparan mengenai mitigasi risiko berfungsi untuk menurunkan asimetri informasi, memberikan jaminan keamanan bagi investor, serta membangun legitimasi bahwa perusahaan mampu menjaga keberlangsungan bisnisnya di tengah ancaman lingkungan. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Nguyen

& Phan (2022) dan Fajri & Hidayat (2023) yang meneliti bahwa Risiko Lingkungan berpengaruh negatif terhadap *Sustainability Reporting*, perusahaan dengan profil risiko lingkungan yang tinggi seringkali memilih untuk membatasi informasi guna menghindari reaksi negatif pasar.

Faktor selanjutnya adalah *Environmental Cost*, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mencegah, meminimalkan, atau memperbaiki dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya (Lalo & Hamiddin, 2021). Biaya ini dapat mencakup pengeluaran untuk pengelolaan limbah, pengendalian emisi, efisiensi energi, serta kegiatan restorasi atau pemulihan lingkungan. Dalam industri manufaktur, khususnya subsektor makanan dan minuman, pengeluaran tersebut menjadi sangat penting karena aktivitas produksi yang melibatkan penggunaan air dalam jumlah besar, pengolahan bahan baku organik, serta potensi timbulnya limbah padat maupun cair yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan sekitar (Yulyan et al., 2024). Besarnya biaya lingkungan yang dikeluarkan perusahaan mencerminkan tingkat kepedulian dan komitmen terhadap keberlanjutan. Perusahaan yang menginvestasikan lebih banyak dana untuk pengelolaan lingkungan cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap tanggung jawab sosial dan ekologisnya. Hal ini berimplikasi pada peningkatan kualitas pengungkapan dalam *sustainability report*, karena informasi mengenai alokasi biaya tersebut dapat menjadi bukti nyata upaya perusahaan dalam meminimalkan dampak negatif kegiatan bisnisnya (Pratiwi & Pahmi, 2024).

Pengaruh *Environmental Cost* terhadap *Sustainability Reporting* telah diteliti pada beberapa penelitian terdahulu, namun menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Yulyan et al., (2024) serta Sandrilla & Permatasari (2025) menunjukkan bahwa *Environmental Cost* berpengaruh positif terhadap *Sustainability Reporting*, perusahaan yang mengalokasikan biaya besar untuk pengelolaan limbah dan konservasi lingkungan cenderung melaporkannya secara transparan dalam *sustainability reporting*. Sedangkan, penelitian Anggraini & Kusuma (2024) dan Ni Putu Nanda Pebrina & Luh

Gede Krisna Dewi (2025) menunjukkan bahwa *Environmental Cost* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Sustainability Reporting*, dimana perusahaan harus memperhatikan kemampuan dalam mengeluarkan biaya lingkungan, biaya pencegahan lingkungan, dan biaya-biaya lainnya agar tidak berdampak negatif pada upaya perusahaan dalam mendapatkan profitabilitas secara maksimal.

Faktor berikutnya adalah *Environmental Performance*, yaitu tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan dampak ekologis yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya (Hasanuh et al., 2025). Kinerja lingkungan mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu menjalankan aktivitas bisnis yang efisien sumber daya, meminimalkan pencemaran, serta menerapkan praktik ramah lingkungan seperti daur ulang limbah, penghematan energi, dan pengurangan emisi gas rumah kaca (Layinatut Taqiyah et, 2025). *Environmental Performance* berkaitan erat dengan kualitas *sustainability reporting* karena tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan menyediakan bukti konkret yang dapat diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Indikator seperti penurunan emisi, pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan konservasi sumber daya alam merupakan bentuk nyata dari komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan yang dapat memperkuat legitimasi di mata publik dan investor (Yunita Maharani & Dwi Riana, 2024). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki *environmental performance* tinggi seharusnya lebih terdorong untuk mengungkapkan *sustainability report* secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban dan bentuk komunikasi nilai keberlanjutan kepada para *stakeholder* (I. P. Dewi et al., 2025).

Pengaruh *Environmental Performance* terhadap *Sustainability Reporting* telah dikaji dalam beberapa penelitian terdahulu, namun hasilnya masih beragam. Penelitian Hapsari et al., (2024) serta Fitriana (2024) menunjukkan bahwa *Environmental Performance* berpengaruh positif terhadap *Sustainability Reporting*, dimana penyusunan atas *sustainability reporting* memberikan informasi kepada para pemakainya atas pengaruh atas

proses produksi atau aktivitas pada perusahaan terhadap lingkungan Sebaliknya, penelitian Anggraini & Kusuma (2024) serta Kholif (2025) Kholif (2025) menjelaskan bahwa *Environmental Performance* berpengaruh negatif terhadap *Sustainability Reporting*, upaya perusahaan dalam pengelolaan lingkungan dan meningkatkan kinerja lingkungan belum mendapat perhatian dari *stakeholder*, sehingga belum meningkatkan *sustainability report*.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu yang menunjukan hasil yang berbeda, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh *Corporate Social Performance,* Risiko Lingkungan, *Environmental Cost,* dan *Environmental Performance* terhadap *Sustainability Reporting*. (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021–2024)".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam latar belakang, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah penelitian, yaitu :

1. Apakah *Corporate Social Performance* berpengaruh terhadap *Sustainability Reporting*?
2. Apakah Risiko Lingkungan berpengaruh terhadap *Sustainability Reporting*?
3. Apakah *Environmental Cost* berpengaruh terhadap *Sustainability Reporting*?
4. Apakah *Environmental Performance* berpengaruh terhadap *Sustainability Reporting*

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menghasilkan fakta empiris dan menghasilkan model terkait :

1. Pengaruh *Corporate Social Performance* terhadap *Sustainability Reporting*
2. Pengaruh Risiko Lingkungan terhadap *Sustainability Reporting*
3. Pengaruh *Environmental Cost* terhadap *Sustainability Reporting*
4. Pengaruh *Environmental Performance* terhadap *Sustainability Reporting*

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pengembangan ilmu dan memberikan kontribusi dalam keilmuan akuntansi khususnya akuntansi sosial dan lingkungan terutama berkaitan dengan *Sustainability Reporting* yang dipengaruhi oleh *Corporate Social Performance,* Risiko Lingkungan, *Environmental Cost* dan *Environmental Performance*.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui penyusunan serta pengungkapan *sustainability report*.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor dalam mengevaluasi risiko, kinerja sosial dan lingkungan, serta prospek keberlanjutan perusahaan melalui pengungkapan *sustainability report* yang transparan dan komprehensif, sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan investasi yang tepat dan berorientasi jangka panjang.

3. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam penyempurnaan regulasi *sustainability report*, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan *sustainability report.*

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis dengan mengembangkan faktor-faktor baru yang dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*.